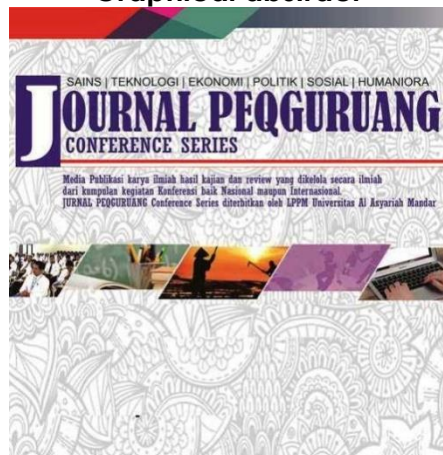


Graphical abstract



ANALISIS KETERTINGGALAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA TALIMBUNG KECAMATAN TANDUKKALUA KABUPATEN MAMASA

¹Ratno Arnanggi, ²Muh. Syariat Tajuddin, ³Andriani

^{1,2,3}Universitas Al Asyariah Mandar
ratno.ar12@gmail.com

Abstract

Infrastructure development in underdeveloped villages such as Talimbung Village plays a very important role in improving the quality of life of its residents. Adequate infrastructure in these villages not only provides better access to basic services such as clean water, electricity, and sanitation, but also supports local economic growth. For example, good roads allow for smoother transportation of goods and people, increasing market access for local products and opening up new business opportunities. In addition, adequate infrastructure is also key to improving access to education and health. With schools and health centers that are easily accessible, residents of Talimbung Village can obtain better education and health services, improving the level of education and health of the community as a whole. Good infrastructure can also increase the sense of security and comfort of village residents by improving security systems and recreational facilities. Infrastructure development in Talimbung Village can also help reduce the gap between villages and cities, leading to more equitable economic growth in various regions of the country. In addition, good infrastructure in villages can be a magnet for private investment and sustainable local economic development.

Keywords: *Analysis, Development, Mamasa*

Abstrak

Pembangunan infrastruktur di desa tertinggal seperti Desa Talimbung memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Infrastruktur yang memadai di desa-desa ini tidak hanya memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan dasar seperti air bersih, listrik, dan sanitasi, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Contohnya, jalan yang baik memungkinkan transportasi barang dan orang menjadi lebih lancar, meningkatkan akses pasar bagi produk lokal dan membuka peluang bisnis baru. Selain itu, infrastruktur yang memadai juga menjadi kunci dalam meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya sekolah dan puskesmas yang mudah dijangkau, penduduk Desa Talimbung dapat memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Infrastruktur yang baik juga dapat meningkatkan rasa aman dan kenyamanan hidup penduduk desa dengan memperbaiki sistem keamanan dan sarana rekreasi. Pembangunan infrastruktur di Desa Talimbung juga dapat membantu mengurangi kesenjangan antara desa dan kota, mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di berbagai wilayah negara. Selain itu, infrastruktur yang baik di desa dapat menjadi magnet untuk investasi swasta dan pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Kata kunci: *Analisis, Pembangunan, Mamasa*

Article history

DOI:

Received : 2024-07-27 | Received in revised form : 2024-11-29 | Accepted : 2024-11-30

1. PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan elemen krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur yang baik memfasilitasi mobilitas, aksesibilitas, dan penyediaan layanan dasar seperti air bersih, jalan, dan fasilitas umum. Namun, ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur dapat menghambat kemajuan dan kesejahteraan suatu daerah, terutama di wilayah-wilayah terpencil dan kurang berkembang. Pembangunan menjadi salah satu hal yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia. (Andriani, 2023)

Pembangunan infrastruktur merupakan komponen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur yang baik, seperti jalan raya, jembatan, dan sistem transportasi umum, memainkan peran krusial dalam memfasilitasi mobilitas dan aksesibilitas. Jalan yang baik mempermudah pergerakan barang dan orang, mempercepat distribusi produk, dan mengurangi biaya transportasi. Hal ini sangat penting bagi sektor ekonomi, termasuk perdagangan, industri, dan pertanian. Selain itu, infrastruktur transportasi umum, seperti bus dan kereta api, memungkinkan akses yang lebih mudah ke berbagai layanan dan peluang pekerjaan, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. (Santosa, 2020)

Penyediaan layanan dasar, seperti air bersih dan fasilitas umum, juga merupakan bagian integral dari pembangunan infrastruktur. Infrastruktur air bersih dan sanitasi yang memadai sangat penting untuk kesehatan masyarakat, mengurangi risiko penyakit, dan meningkatkan kualitas hidup. Fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan pasar meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi dengan menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Pembangunan infrastruktur yang baik juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan investasi dari sektor swasta, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi. (Sari, 2019)

Namun, ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur dapat menghambat kemajuan ekonomi dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Ketika infrastruktur jalan dan transportasi buruk, biaya transportasi meningkat, yang mengurangi daya saing produk lokal di pasar dan menghambat perdagangan serta investasi. Keterbatasan akses ke pasar mengurangi potensi pendapatan bagi petani dan pengusaha kecil, yang berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ketidakmampuan untuk menyediakan air bersih dan sanitasi yang memadai dapat menyebabkan masalah kesehatan serius, seperti penyakit menular dan kekurangan gizi. Kurangnya fasilitas pendidikan dan kesehatan mempengaruhi perkembangan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. (Anwar, 2021)

Ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur juga memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi antara daerah urban dan pedesaan atau antara daerah kaya dan miskin. Daerah yang kurang berkembang sering kali mengalami kesenjangan dalam hal infrastruktur, yang memperburuk ketimpangan dan menghambat potensi pertumbuhan dan perkembangan. Oleh karena itu, investasi dalam pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas untuk menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata. (Hidayat, 2022)

Desa Talimbung, yang terletak di Kecamatan Tandukkalua, Kabupaten Mamasa, merupakan contoh dari desa yang mengalami ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur. Desa ini terdiri dari enam dusun—Dusun Minanga, Dusun Balla-Balla, Dusun Salutallang, Dusun Pelanggan, Dusun Liarra, dan Dusun Talimbung—dan mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Meskipun memiliki potensi yang besar, desa ini belum mendapatkan fasilitas pembangunan infrastruktur yang memadai, seperti pengaspalan jalan, sarana air bersih, dan prasarana umum lainnya. (Rachmawati, 2018)

Ketertinggalan ini terlihat dari kondisi jalan yang rusak, kurangnya akses terhadap air bersih, dan fasilitas umum yang belum berkembang. Dampak dari kekurangan infrastruktur ini sangat dirasakan oleh masyarakat, menghambat kegiatan ekonomi, serta mengurangi kualitas hidup mereka. Di tengah upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi infrastruktur di seluruh Indonesia, penting untuk memahami tantangan spesifik yang dihadapi oleh desa-desa seperti Talimbung.

Ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur di Desa Talimbung terlihat jelas dari beberapa aspek kritis, termasuk kondisi jalan yang rusak, kurangnya akses terhadap air bersih, dan fasilitas umum yang belum berkembang. Ketiga aspek ini saling berhubungan dan memiliki dampak signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat dan kegiatan ekonomi desa.

Kondisi jalan yang rusak menghambat (Haryanto, 2020) aksesibilitas dan mobilitas di Desa Talimbung. Jalan yang buruk menyebabkan kesulitan dalam transportasi barang dan orang, meningkatkan biaya transportasi, dan memperlambat distribusi produk. Hal ini berdampak pada sektor ekonomi, khususnya bagi petani yang bergantung pada transportasi untuk memasarkan hasil pertanian mereka. Kesulitan dalam mengakses pasar juga dapat mengurangi daya saing produk lokal dan membatasi pendapatan petani. Selain itu, jalan yang rusak berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan dan menurunkan keselamatan pengguna jalan.

Akses terhadap air bersih adalah salah satu aspek vital dalam pembangunan infrastruktur. Kurangnya akses terhadap air bersih di Desa Talimbung dapat menyebabkan masalah kesehatan serius, seperti penyakit menular dan kekurangan gizi. Air bersih yang tidak memadai meningkatkan risiko terjadinya penyakit

seperti diare, kolera, dan infeksi saluran pencernaan lainnya. Selain berdampak pada kesehatan masyarakat, kekurangan air bersih juga mempengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti kebutuhan untuk mandi, mencuci, dan kegiatan pertanian yang bergantung pada air.

Fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan pasar yang belum berkembang mengurangi kualitas hidup masyarakat desa. Kurangnya fasilitas pendidikan membatasi akses anak-anak ke pendidikan yang berkualitas, yang berdampak pada pengembangan keterampilan dan peluang masa depan mereka. Tanpa fasilitas kesehatan yang memadai, masyarakat menghadapi kesulitan dalam mendapatkan perawatan medis yang diperlukan, yang dapat memperburuk kondisi kesehatan mereka. Selain itu, pasar yang tidak memadai membatasi akses masyarakat untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan menjual produk lokal, yang berdampak pada ekonomi lokal.

Dampak dari kekurangan infrastruktur ini sangat dirasakan oleh masyarakat Desa Talimbung. Ketidakmampuan untuk mengakses fasilitas dasar menghambat kegiatan ekonomi dan mengurangi kualitas hidup. Aktivitas ekonomi menjadi terhambat karena biaya transportasi yang tinggi dan akses yang terbatas ke pasar. Kesehatan masyarakat terpengaruh oleh kurangnya akses terhadap air bersih dan fasilitas kesehatan, yang dapat menyebabkan peningkatan angka sakit dan menurunnya produktivitas. Kualitas hidup masyarakat menurun akibat terbatasnya akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Di tengah upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi infrastruktur di seluruh Indonesia, memahami tantangan spesifik yang dihadapi oleh desa-desa seperti Talimbung sangat penting. Tantangan ini meliputi keterbatasan sumber daya, tantangan geografis, dan kendala dalam perencanaan serta pelaksanaan proyek pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan lokal untuk mengatasi ketertinggalan ini. Pendekatan ini harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat desa, alokasi anggaran yang memadai, serta koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai hasil yang efektif dan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena atau peristiwa tertentu secara mendalam dengan menggunakan data kualitatif. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk memberikan gambaran yang rinci dan menyeluruh tentang situasi yang sedang diteliti berdasarkan perspektif partisipan. Penelitian kualitatif deskriptif dilakukan dalam lingkungan alami tanpa manipulasi atau kontrol yang ketat, di mana peneliti mengamati dan mengumpulkan data dari situasi sebenarnya untuk memahami fenomena dalam konteks aslinya. (Notoatmodjo, 2018)

Metode ini menitikberatkan pada pengalaman, persepsi, dan pandangan subjek penelitian. Data yang

dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, atau objek yang mencerminkan pandangan subjek. Pengumpulan data biasanya dilakukan melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara tematik, di mana peneliti mencari pola dan tema yang muncul dari data. Proses ini melibatkan pengkodean data, identifikasi tema utama, dan interpretasi makna dari data yang dikumpulkan. (Moleng, 2019)

Proses penelitian kualitatif deskriptif dimulai dengan penentuan fokus penelitian, di mana peneliti menetapkan masalah atau fenomena yang akan diteliti. Fokus penelitian biasanya ditentukan berdasarkan minat peneliti atau kebutuhan masyarakat yang relevan. Setelah itu, partisipan dipilih secara purposif, artinya dipilih karena mereka memiliki pengalaman atau pengetahuan khusus yang relevan dengan masalah penelitian. Dengan demikian, penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang mendalam dan komprehensif mengenai fenomena yang sedang diteliti, berdasarkan pandangan dan pengalaman partisipan yang terlibat di mana penelitian difokuskan pada satu desa yaitu Desa Talimbung (Saryono, 2018)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Sebelum Melakukan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber di Desa Talimbung, terlihat bahwa proses perencanaan pembangunan infrastruktur desa dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui serangkaian musyawarah. Proses ini mencakup musyawarah di tingkat dusun hingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDes), yang merupakan forum utama untuk merencanakan pembangunan desa.

Menurut Bapak Bonggarana', musyawarah di tingkat dusun melibatkan 1-10 orang dari setiap dusun yang dikumpulkan untuk membahas prioritas pembangunan. Ini menunjukkan bahwa setiap dusun memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka secara langsung. Bapak Simon K. menambahkan bahwa sebelum MUSRENBANGDes, Kepala Desa Talimbung melaksanakan musyawarah tingkat dusun, yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, warga dusun, dan lembaga yang ada di dusun tersebut, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Demmapallu, sekretaris desa. Musyawarah tingkat dusun ini menjadi langkah awal yang krusial dalam proses perencanaan pembangunan karena memberikan kesempatan kepada masyarakat di setiap dusun untuk berpartisipasi aktif dalam menetapkan prioritas pembangunan.

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan kepala desa dan tokoh masyarakat, diketahui bahwa musyawarah tingkat dusun ini sangat penting untuk menentukan prioritas pembangunan yang akan diajukan pada saat MUSRENBANGDes. Kepala Dusun Minanga

menguatkan pernyataan ini dengan menyebutkan bahwa rapat di tingkat dusun membahas kebutuhan pembangunan sarana prasarana fisik dengan menghadirkan lembaga yang ada di dusun dan tokoh masyarakat sebagai penasihat dan penghubung aspirasi masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya partisipasi aktif dari berbagai pihak di tingkat dusun dalam proses perencanaan.

Bapak Seniawan menjelaskan bahwa dalam tahap perencanaan pembangunan, setiap perangkat desa bertanggung jawab untuk melihat kondisi lingkungan di masing-masing dusun, baik terkait pembangunan fisik maupun sosial. Setelah itu, dilakukan MUSRENBANGDes dengan melibatkan masyarakat desa, tokoh masyarakat, dan pihak lembaga terkait. Tinjauan lapangan ini penting untuk mengetahui kondisi lingkungan masyarakat dan menjadi bahan pertimbangan atas usulan warga, seperti pembangunan jalan pemukiman maupun jalan menuju sawah. Pemerintah desa juga mempertimbangkan pembangunan tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang.

Bapak Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Desa menambahkan bahwa mekanisme alur perencanaan pembangunan sesuai dengan aturan pemerintah pusat dan daerah diterapkan di desa. Ini memastikan bahwa seluruh proses berjalan dengan baik, terstruktur, dan sesuai dengan aturan, yang pada akhirnya berdampak baik bagi kelangsungan proses pembangunan dan hasil yang maksimal. Pertimbangan perencanaan diperlukan untuk mengembangkan strategi yang optimal dalam mencapai tujuan yang diinginkan di masa depan serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.

Secara keseluruhan, proses perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Talibung dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak dan melalui tahapan-tahapan yang sistematis. Musyawarah tingkat dusun dan MUSRENBANGDes menjadi forum utama bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan prioritas pembangunan. Tinjauan lapangan dan evaluasi pembangunan sebelumnya juga menjadi bagian penting dalam proses perencanaan ini, sehingga program pembangunan yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan.

B. Perencanaan pembangunan Desa Talibung, Kecamatan Tandukkalua, Kabupaten Mamasa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber di Desa Talibung, perencanaan pembangunan desa dilakukan melalui proses yang sistematis dan partisipatif, dimulai dari tingkat dusun hingga ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDes). Bapak Demmaroa' menjelaskan bahwa usulan-usulan pembangunan yang dianggap penting oleh masyarakat dibawa ke MUSRENBANGDes setelah melalui musyawarah di tingkat dusun. Agustinus menambahkan bahwa usulan yang telah ditampung dari masyarakat dibawa ke MUSRENBANGDes untuk

dibahas lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan dimulai dari penjurangan aspirasi di tingkat yang paling bawah, yaitu dusun, sebelum dibawa ke forum yang lebih tinggi.

Bapak Dettumanan menegaskan pentingnya menampung banyak usulan dari warga untuk kemudian dijadikan bahan dalam MUSRENBANGDes. Tim penyusun usulan pembangunan desa kemudian akan menyusun prioritas berdasarkan usulan-usulan tersebut. Tahap awal perencanaan ini, yang melibatkan musyawarah dari tingkat paling bawah, sangat penting untuk mengidentifikasi kebutuhan nyata masyarakat terkait pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang kesejahteraan mereka.

Setiap usulan yang diajukan oleh warga dan tokoh masyarakat ditampung selama MUSRENBANGDes. Pihak desa, melalui tim penyusun, kemudian menganalisis dan mempertimbangkan usulan tersebut untuk menetapkan prioritas pembangunan. Bapak Bonggarana' menjelaskan bahwa data dan informasi yang dibawa ke musyawarah akan dipadukan dengan masukan dari staf desa yang memiliki pengetahuan rinci tentang kondisi lingkungan. Ini memungkinkan penentuan prioritas yang tepat untuk mengoptimalkan pembangunan.

Pernyataan Bapak Demmapallu selaras dengan kepala desa, yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan desa melalui tahap menampung usulan masyarakat, kemudian dilakukan pengecekan di wilayah yang diusulkan. Informasi dari perangkat desa membantu pemangku kebijakan memahami kebutuhan pembangunan infrastruktur yang harus didahulukan. Tahapan perencanaan ini juga berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan, memudahkan pihak desa sebagai tim penyusun dan pelaksana, serta memudahkan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk memberikan arahan dan melakukan pemantauan pembangunan.

C. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa diterapkan dalam tahap perencanaan

Pelaksanaan MUSRENBANGDes diterapkan dalam tahap perencanaan pembangunan Desa Talibung. Bapak Simon K. menyatakan bahwa MUSRENBANGDes efektif karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bapak Yermia menekankan pentingnya menampung usulan masyarakat dalam proses ini. MUSRENBANGDes merupakan komponen penting dalam menampung usulan masyarakat dan dilakukan setiap tahunnya untuk mengetahui kebutuhan masyarakat dalam bidang pembangunan desa.

Pemerintah desa bertindak sebagai fasilitator yang menyediakan wadah untuk menampung usulan masyarakat, yang kemudian menjadi daftar permasalahan dan usulan kegiatan desa dalam perencanaan pembangunan. Hal ini meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pembangunan sarana prasarana di desanya, serta

mempererat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat.

Bapak Simon K. juga menambahkan bahwa pengambilan keputusan dalam perencanaan berorientasi ke masa depan dan disusun untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin muncul di masa mendatang. Meskipun hasil MUSRENBANGDes menjadi dasar penting, kebijakan yang diambil juga mempertimbangkan aspek lain untuk memutuskan perencanaan yang berimbang dan sesuai aturan.

Bapak Dettumanan menyatakan pentingnya perencanaan prioritas untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) memerlukan proses perencanaan yang matang dari awal hingga tersusunnya APBDes. Infrastruktur jalan, misalnya, menjadi prioritas karena penting bagi perkembangan ekonomi desa, terutama bagi mayoritas penduduk yang berprofesi sebagai petani. Infrastruktur jalan yang memadai juga berdampak positif bagi pedagang di pasar desa, sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat.

Selain infrastruktur jalan, kebutuhan pembangunan fisik lainnya seperti sanitasi lingkungan juga menjadi prioritas. Sanitasi yang baik memudahkan penyerapan air dan aliran air ke sungai besar, penting karena kondisi desa yang sering mengalami banjir saat musim hujan.

Arah kebijakan pemerintah desa dalam pembangunan bertujuan menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi, termasuk kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi wilayah, khususnya pertanian. Hal ini mendorong usaha-usaha untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang tidak dapat diperbarui dan memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui, menuju masyarakat yang berkualitas, maju, dan mandiri.

Ketidaktersediaan infrastruktur yang memadai berdampak buruk pada kualitas hidup, pemberantasan kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Oleh karena itu, aturan yang diberikan pemerintah pusat dan daerah sebagai pedoman sangat penting untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan percepatan pembangunan, yang berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat yang lebih sejahtera.

D. Latar belakang atau alasan pengusulan pembangunan dalam tahap perencanaan

Berdasarkan data penelitian, latar belakang atau alasan pengusulan pembangunan infrastruktur di Desa Talimbung, Kecamatan Tandukkalua, Kabupaten Mamasa, didasari oleh beberapa pertimbangan utama yang berfokus pada kebutuhan mendesak masyarakat dan kondisi geografis desa. Bapak Simon K menekankan pentingnya memprioritaskan kondisi infrastruktur yang paling parah dan harus segera diperbaiki. Pendekatan ini mencerminkan keinginan untuk menangani permasalahan yang paling mendesak terlebih dahulu, seperti infrastruktur yang rusak parah dan

membutuhkan tindakan cepat agar tidak memperburuk kondisi desa.

Selain itu, Bapak Edward menekankan pentingnya mempertimbangkan kebutuhan prioritas seperti pembangunan saluran air untuk menanggulangi banjir di musim hujan. Pernyataan ini didukung oleh kondisi desa yang sering mengalami banjir akibat curah hujan tinggi dan kiriman air dari desa-desa sekitar. Drainase menjadi prioritas utama karena ketersediaan saluran air di lingkungan rumah warga tidak hanya membantu menanggulangi banjir tetapi juga berdampak positif bagi lahan resapan lingkungan. Air hujan dapat dialirkan langsung ke sungai besar, mengurangi genangan air yang dapat merusak infrastruktur dan kesehatan masyarakat.

Pentingnya pemerataan pembangunan juga ditekankan oleh Bapak Yermia. Ia menyatakan bahwa pembangunan harus merata di seluruh wilayah desa untuk memastikan bahwa semua bagian desa merasakan manfaat dari pembangunan tersebut. Pemerataan pembangunan dianggap penting untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program, sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih mudah tercapai dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil dan merata.

Selanjutnya, Bapak Dettumanan menyoroti pentingnya mendahulukan pembangunan yang mendesak melalui skala prioritas. Pendekatan ini didukung oleh kenyataan bahwa pembangunan infrastruktur yang direncanakan dan sistematis pada sektor-sektor yang diprioritaskan dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Bapak Bonggarana menambahkan bahwa prioritas pembangunan desa sudah ditetapkan pada saat MUSRENBANGDes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa), yang mencerminkan proses perencanaan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Dari latar belakang tersebut, jelas bahwa perencanaan pembangunan di Desa Talimbung didasarkan pada prinsip-prinsip pemerataan, penanggulangan masalah mendesak, dan efektivitas pelaksanaan program. Hal-hal yang melatarbelakangi pembangunan berorientasi pada kemanfaatan bagi masyarakat dan prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional melalui pemerataan pembangunan yang dimulai dari lingkup desa. Perencanaan pembangunan yang ditetapkan merupakan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi desa, dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

4. SIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian mengenai latar belakang dan tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Talimbung, Kecamatan Tandukkalua, Kabupaten Mamasa, menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa didasarkan pada prinsip-prinsip

kebutuhan mendesak, pemerataan, dan efektivitas program. Pertama, prioritas pembangunan diberikan pada infrastruktur yang mengalami kerusakan parah dan membutuhkan penanganan segera, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Simon K. Kedua, pembangunan saluran air untuk menanggulangi banjir menjadi fokus utama karena kondisi geografis desa yang rentan banjir selama musim hujan, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Edward.

Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah desa juga menjadi perhatian utama untuk memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara adil oleh semua warga desa, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Yermia. Hal ini sejalan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Selain itu, proses perencanaan yang partisipatif melalui MUSRENBANGDes menunjukkan adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan, yang ditegaskan oleh Bapak Bongabarana.

Tahap pelaksanaan pembangunan diawali dengan musyawarah dusun dan pengumuman program oleh kepala desa, diikuti dengan pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) setelah pencairan dana. Pelaksanaan pembangunan harus mengacu pada petunjuk teknis dari pemerintah daerah, dengan perhatian khusus pada kondisi geografis desa yang sering mengalami pergerakan tanah dan kendala cuaca.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang terencana, sistematis, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan yang memperhatikan prioritas mendesak, pemerataan manfaat, dan keterlibatan masyarakat, pembangunan infrastruktur di Desa Talimbung diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani. (2023). STRATEGI PEMERINTAH DESA SINDAGAMANIK KECAMATAN TANDUKKALUA KABUPATEN MAMASA DALAM MENGHADAPI DAMPAK PANDEMI COVID 19 DALAM BIDANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR . *Journal Pegguruang: Conference Series*, 5(1).
- Anwar, A. (2021). Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Kearifan Lokal dalam Konteks Desa. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi*, 5(3).
- Haryanto, E. (2020). Tantangan dan Strategi dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa di Daerah Terpencil. *Jurnal Pembangunan Regional*, 1(1).
- Hidayat, T. (2022). Evaluasi Efektivitas Pembangunan Infrastruktur Desa. *Jurnal Evaluasi dan Pengembangan*, 10(4).
- Moleng, L. J. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantatif*. Jakarta: Gramedia.

Notoatmodjo. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Jakarta: Gramedia.

Rachmawati, S. (2018). Peran Infrastruktur dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 9(2).

Santosa, P. (2020). Perencanaan dan Pengelolaan Infrastruktur Desa: Pendekatan Berbasis Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 2(2).

Sari, D. (2019). Analisis Kebutuhan Infrastruktur dan Prioritas Pembangunan Desa. *Jurnal Infrastruktur dan Pembangunan*, 8(1).

Saryono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Untuk Ilmu-ilmu Sosial, Keperawatan, dan Ilmu-ilmu Keperawatan*. Bandung: Rosdakarya.